



Pemberdayaan Sentra Wisata Kuliner (SWK) Kecamatan Jambangan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya

Alifian Kusuma Rizki^{1✉}, Arvinda Arda Yuanita², Shevila Afriza Saputri³,
Sarah Meirina Sari⁴

UPN "Veteran" Jawa Timur

Email: 22041010099@student.upnjatim.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pengelolaan pedagang kaki lima (PKL), menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Studi ini mengkaji efektivitas program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya terhadap Sentra Wisata Kuliner (SWK) Kecamatan Jambangan, sebuah kawasan yang mengalami penurunan daya tarik dibandingkan sentra lain di Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka teori ACTORS (Authority, Competence, Trust, Opportunities, Responsibilities, Support), penelitian ini mengeksplorasi bentuk pemberdayaan, tantangan, serta dampaknya pada pelaku usaha dan keberlanjutan SWK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan berjalan secara komprehensif dengan pelatihan usaha, fasilitasi legalitas, pendampingan, promosi, dan revitalisasi infrastruktur. Namun, tantangan seperti kurangnya inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital yang terbatas, dan rendahnya konsistensi pelaku usaha menjadi hambatan utama. Persepsi pelaku usaha terhadap program ini positif, namun mereka mengharapkan pelatihan yang lebih relevan dan promosi yang lebih berkelanjutan. Studi ini memberikan kontribusi baru dalam literatur pemberdayaan ekonomi kreatif lokal dengan menyoroti kebutuhan strategi pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan SWK sebagai pusat ekonomi kreatif dan wisata kuliner.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, Sentra Wisata Kuliner, ACTORS, Ekonomi Kreatif*

Abstract

Community empowerment, particularly through the strengthening of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and the management of street vendors, has become a priority in Indonesia's national economic development. This study examines the effectiveness of the empowerment programs carried out by the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, and Trade of Surabaya City towards the Culinary Tourism Center (Sentra Wisata Kuliner, or SWK) in Jambangan District—an area experiencing a decline in attractiveness compared to other centers in Surabaya. This research adopts a qualitative approach and employs the ACTORS framework (Authority, Competence, Trust, Opportunities, Responsibilities, Support). It explores the forms of empowerment, challenges encountered, and the program's impact on business actors and the sustainability of the SWK. The findings show that the empowerment program is implemented comprehensively, including business training, legal facilitation, mentoring, promotion, and infrastructure revitalization. However, key challenges remain, such as limited product innovation, insufficient use of digital technology, and low consistency among business actors. While entrepreneurs perceive the program positively, they expressed the need for more relevant training and more sustainable promotional efforts. This study contributes to the literature on local creative economic empowerment by highlighting the need for locally tailored empowerment strategies and cross-sectoral collaboration to support the sustainability of SWKs as hubs for creative economy and culinary tourism.

Keywords: *Community Empowerment, Msmes, Culinary Tourism Center, ACTORS Framework, Creative Economy*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan isu strategis yang mendapat perhatian besar dalam pembangunan nasional dan internasional. Di Indonesia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengelolaan pedagang kaki lima (PKL), menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menegaskan pentingnya penguatan ekonomi rakyat melalui UMKM dan pemberdayaan komunitas lokal sebagai upaya mengatasi ketimpangan sosial dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung tumbuh kembang UMKM yang berkelanjutan sebagai pilar ekonomi nasional. Pemerintah mengadopsi pendekatan bottom-up dalam tata kelola pembangunan guna memberdayakan masyarakat secara langsung dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

Secara global, sektor ekonomi kreatif, khususnya pariwisata kuliner, juga semakin mendapat perhatian sebagai motor penggerak ekonomi dan pencipta lapangan kerja, terutama di perkotaan. Kemenparekraf (2023) melaporkan bahwa subsektor kuliner menyumbang lebih dari 40% kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di sektor informal. Sentra Wisata Kuliner (SWK) muncul sebagai inovasi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi mikro dan pengembangan destinasi wisata kuliner. SWK tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan makanan dan minuman, tetapi juga sebagai ruang sosial budaya dan ekonomi yang menghidupkan dinamika kota serta memperkuat identitas kuliner lokal (Failina & Widiyarta, 2023).

Literatur sebelumnya telah menunjukkan berbagai manfaat pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan UMKM dan pariwisata. Menurut Mardikanto (2014) dalam Afdhal (2023), pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam memperbaiki kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan sosial yang memandang perubahan sebagai hasil dari peningkatan kapasitas dan kontrol individu atau kelompok terhadap sumber daya. Di sisi lain, teori ekonomi kreatif yang dikembangkan Schumpeter (1939) dalam Rahmawati (2021) menegaskan bahwa kreativitas dan inovasi menjadi kunci pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengandalkan sumber daya terbarukan seperti ide dan talenta manusia. Faktor-faktor seperti kualitas tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan kemajuan teknologi berperan signifikan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif. Lebih lanjut, pendekatan pemberdayaan "ACTORS" dari Cook dan Macaulay (1997) memberikan kerangka teoritis yang komprehensif dalam memahami dinamika pemberdayaan masyarakat, melalui komponen wewenang, kompetensi, kepercayaan, peluang, tanggung jawab, dan dukungan, yang jika dijalankan secara sinergis dapat menghasilkan perubahan sosial yang terencana dan berkelanjutan (Maami, 2011).

Meski banyak penelitian telah mengkaji pemberdayaan UMKM dan pariwisata kuliner secara umum, masih terdapat kekurangan dalam kajian yang fokus pada efektivitas pemberdayaan pemerintah daerah di tingkat sentra wisata kuliner tertentu. Contoh nyata adalah Sentra Wisata Kuliner Kecamatan Jambangan di Surabaya, yang menunjukkan performa yang menurun dibandingkan dengan SWK lain di Surabaya Selatan seperti Karah dan Bentul. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kendala dan peluang pemberdayaan di level lokal yang spesifik, yang belum banyak terungkap dalam riset

terdahulu. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek makro dan bersifat umum tanpa menyentuh konteks implementasi kebijakan pemberdayaan yang konkret dan tantangan riil yang dihadapi para pelaku usaha mikro di sentra tersebut.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya menjalankan program pemberdayaan dalam pengembangan Sentra Wisata Kuliner Kecamatan Jambangan. Pendekatan penelitian menggunakan teori ACTORS sebagai landasan konseptual, yang memungkinkan analisis sistematis terhadap pelaksanaan pemberdayaan yang meliputi aspek otoritas, kompetensi, kepercayaan, kesempatan, tanggung jawab, dan dukungan. Penelitian ini bertujuan memahami sejauh mana pemberdayaan tersebut berdampak pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan PKL di kawasan tersebut serta bagaimana hal itu memengaruhi keberlanjutan dan daya tarik SWK sebagai pusat ekonomi kreatif dan wisata kuliner.

Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah mengungkap dinamika pemberdayaan yang sedang berlangsung, kendala yang muncul, serta strategi yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan fungsi Sentra Wisata Kuliner sebagai alat pemberdayaan ekonomi mikro sekaligus destinasi wisata. Novelty penelitian ini terletak pada pendalaman konteks pemberdayaan di level lokal yang spesifik dan penggunaan kerangka teori pemberdayaan ACTORS yang komprehensif, yang belum banyak diaplikasikan dalam studi pemberdayaan ekonomi kreatif di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemangku kebijakan dalam merancang dan mengelola program pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat literatur akademik terkait pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan strategi kualitatif untuk menggali dan memahami secara mendalam isu pemberdayaan Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya di Kecamatan Jambangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menyelidiki fenomena sosial secara kontekstual dan mendalam, serta memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika pemberdayaan yang sedang berlangsung. Koentjaraningrat (1993) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman peristiwa yang dapat diamati dan pengembangan pertanyaan yang mengarahkan proses

pengumpulan serta analisis data secara sistematis. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh narasi yang komprehensif dan bermakna dari para pelaku serta pengelola SWK, yang kemudian dianalisis untuk memberikan wawasan empiris terkait efektivitas dan tantangan pemberdayaan.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya yang berperan sebagai pengelola dan pelaksana program pemberdayaan SWK, beralamat di Jl. Tunjungan No. 1-3, Genteng, Surabaya. Teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling untuk memilih narasumber yang memiliki otoritas dan pemahaman mendalam terkait pengelolaan SWK Jambangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terkait aktivitas pemberdayaan serta kondisi pelaku usaha. Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif sesuai metode Miles dan Huberman, meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara simultan agar diperoleh hasil yang valid dan dapat dipercaya. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan pemberdayaan dan relevansinya dengan teori ACTORS sebagai landasan konseptual penelitian (Maani, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya terhadap Sentra Wisata Kuliner (SWK) Kecamatan Jambangan berlangsung dalam kerangka yang cukup terstruktur dan komprehensif, dengan berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro melalui berbagai program dan intervensi kebijakan. Dinas Koperasi berperan tidak hanya sebagai fasilitator administratif tetapi juga sebagai pelaksana langsung di lapangan yang melakukan pendampingan harian, monitoring aktivitas pedagang, evaluasi omzet, serta pengelolaan kondisi lingkungan dan fasilitas fisik SWK. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada pemberian fasilitas, melainkan juga menyentuh aspek pengembangan sumber daya manusia dan pembentukan iklim usaha yang kondusif.

Pada aspek otoritas (*Authority*), Dinas Koperasi memiliki peran penting dalam mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi aktivitas pedagang yang berjualan di SWK Jambangan. Pendampingan yang dilakukan secara intensif setiap hari memungkinkan deteksi dini atas permasalahan operasional dan memberikan arahan kepada pedagang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Hal ini sesuai dengan pernyataan staf analis Dinas Koperasi yang mengungkapkan bahwa monitoring harian dilakukan untuk memastikan

kelancaran aktivitas usaha serta kondisi sarana dan prasarana. Pendekatan ini berbeda dengan model pemberdayaan yang lebih bersifat administratif dan jarang menyentuh operasional secara langsung, sehingga menjadi kekuatan dalam meningkatkan keterlibatan pelaku usaha dan efektivitas program.

Dinas Koperasi juga menyediakan berbagai pelatihan untuk mengembangkan kompetensi (*Competence*) pelaku usaha, yang meliputi manajemen keuangan, pemasaran digital, inovasi kuliner, serta pengelolaan anggaran. Pelatihan-pelatihan ini dirancang untuk menyesuaikan dengan tren pasar dan kebutuhan spesifik UMKM yang beroperasi di SWK. Namun, hasil wawancara mengindikasikan bahwa efektivitas pelatihan masih terbatas oleh kurangnya penyesuaian dengan karakteristik usaha masing-masing pelaku. Beberapa pedagang menganggap pelatihan bersifat terlalu umum dan belum cukup mengakomodasi kebutuhan teknis spesifik yang dapat langsung diterapkan. Evaluasi berkala dan pendampingan intensif menjadi kunci agar pelatihan tersebut dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas produk dan layanan yang nyata. Pengelolaan legalitas usaha seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) juga termasuk dalam program yang terus didorong oleh dinas untuk meningkatkan kredibilitas dan akses pasar para pelaku usaha.

Meskipun telah ada upaya membangun kepercayaan (*Trust*) antara Dinas Koperasi dan pelaku usaha, persepsi terhadap efektivitas program pemberdayaan masih beragam. Pelaku usaha yang aktif dan serius mengapresiasi pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, khususnya yang terkait inovasi produk dan pengelolaan usaha. Namun, sebagian lain merasakan bahwa monitoring yang dilakukan belum selalu disertai solusi praktis terhadap kendala teknis di lapangan, seperti perbaikan fasilitas umum yang lambat ditangani. Hal ini menyebabkan sebagian pelaku merasa kurang diperhatikan sebagai mitra sejati dalam pembangunan SWK. Kepercayaan dan loyalitas pelaku usaha menjadi variabel penting yang harus dijaga agar pemberdayaan dapat berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat.

Peluang (*Opportunities*) yang disediakan oleh Dinas Koperasi mencakup perbaikan fasilitas fisik, seperti renovasi kios, perbaikan fasilitas umum, serta pemanfaatan teknologi digital melalui penyediaan internet dan sistem pembayaran nontunai (QRIS). Namun, masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses teknologi dan keterampilan digital di kalangan pelaku usaha. Beberapa pedagang telah memanfaatkan platform digital seperti Shopee dan media sosial untuk memasarkan produk, tetapi adopsi teknologi ini belum merata dan masih menjadi kendala utama bagi sebagian besar pelaku. Selain itu, akses pembiayaan melalui koperasi dan lembaga keuangan yang difasilitasi dinas belum optimal dijangkau

oleh seluruh pelaku, sebagian disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pemahaman akan mekanisme pengajuan modal.

Tanggung jawab (*Responsibilities*) Dinas Koperasi terlihat dalam upaya promosi produk kuliner melalui berbagai lomba dan kampanye media sosial, yang berhasil meningkatkan citra SWK sebagai destinasi wisata kuliner unggulan di Surabaya Selatan. Pencapaian tersebut turut meningkatkan pendapatan pelaku usaha yang konsisten menjalankan bisnisnya. Namun, tingkat partisipasi pedagang masih rendah, dengan hanya sekitar sepertiga stan yang aktif beroperasi secara reguler. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha sangat dipengaruhi oleh mentalitas dan komitmen individu pelaku usaha. Pelaku yang sekadar mencoba-coba cenderung cepat menyerah menghadapi tantangan pasar, sedangkan yang serius mampu bertahan dan berkembang.

Dukungan (*Support*) yang diberikan oleh Dinas Koperasi juga menghadapi tantangan signifikan, terutama karena munculnya usaha rumahan di sekitar SWK yang menyedot potensi pengunjung. Fenomena ini mengindikasikan perlunya strategi pemberdayaan yang tidak hanya fokus pada SWK saja, tetapi juga harus mengakomodasi dinamika ekonomi mikro di lingkungan sekitar secara lebih luas. Kolaborasi lintas sektor dan penguatan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk CSR dan perguruan tinggi, menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi fragmentasi pasar dan memperkuat ekosistem bisnis kuliner di kawasan tersebut.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan SWK Jambangan melalui pendekatan ACTORS memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usaha mikro. Namun, berbagai kendala seperti rendahnya konsistensi pelaku usaha, keterbatasan inovasi produk, kurangnya pemanfaatan teknologi digital secara efektif, serta masalah infrastruktur dan fasilitas yang belum memadai, menjadi hambatan utama yang perlu diatasi secara serius. Temuan ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga memerlukan kesiapan mental, komitmen, dan kemampuan adaptasi pelaku usaha terhadap perubahan pasar dan teknologi. Penelitian ini juga menunjukkan perlunya evaluasi dan tindak lanjut berkelanjutan dari program pemberdayaan agar dampak positif dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh pemangku kepentingan.

Penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada pemberdayaan UMKM secara umum atau analisis kuantitatif dampak ekonomi. Fokus mendalam pada pemberdayaan SWK Jambangan yang menghadapi tantangan spesifik di tingkat lokal, serta penerapan teori ACTORS sebagai kerangka konseptual, menjadi

kontribusi baru dalam literatur pemberdayaan ekonomi kreatif di Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan strategis bagi pengambil kebijakan dalam merancang program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengkaji bentuk, tantangan, dan efektivitas pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya terhadap Sentra Wisata Kuliner (SWK) Kecamatan Jambangan. Program pemberdayaan yang dijalankan telah cukup komprehensif dan terstruktur, meliputi pelatihan usaha, fasilitasi legalitas, pendampingan harian, serta promosi dan revitalisasi infrastruktur. Model ACTORS yang diaplikasikan dalam pemberdayaan ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelaku usaha, meskipun masih ada hambatan pada kompetensi digital, inovasi produk, dan pemasaran. Persepsi pelaku usaha umumnya positif, namun mereka mengharapkan pelatihan yang lebih relevan dan promosi yang berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, keberhasilan SWK Jambangan sebagai katalisator ekonomi lokal sangat bergantung pada kesinambungan program, komitmen pelaku usaha, dan dukungan kolaboratif lintas sektor.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan, beberapa saran diajukan kepada pemangku kepentingan. Dinas Koperasi diharapkan mengembangkan strategi pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal serta memperluas kerja sama dengan media, komunitas kreatif, dan perguruan tinggi untuk mendukung promosi dan pelatihan yang tepat sasaran. Pelaku usaha diharapkan lebih proaktif dalam mengembangkan kapasitas, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan daya saing. Pemerintah daerah dan stakeholder lain perlu memperkuat regulasi dan dukungan anggaran untuk menjamin kesinambungan program, serta mengintegrasikan SWK dalam tata ruang dan pariwisata kota. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi longitudinal dan komparatif antar SWK di Surabaya untuk menghasilkan model pemberdayaan yang adaptif dan dapat direplikasi secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Afdhal, A., Mustanir, A., Ilmi, A., Aksal, F., Iwan, M., Kusnadi, H., Fauzan, R., & Duwi, A., Rina, S., & Abdurohim, W. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. PT GLOBAL EKSEKUTIF

TEKNOLOGI.

- Failina, D., & Widiyarta, A. (2023). Model Pemberdayaan UMKM Berbasis Kawasan dalam Tata Kelola Sentra Kuliner Kota. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 15(2), 117–132. Maami, D. K. (2011). Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Demokrasi*, 10(1), 54–66.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.